



# RENCANA KERJA (RENJA)



*Dinas Perhubungan  
Kota Tanjungpinang*

**TAHUN  
2024**

# Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang 2024-2026 yang mengacu pada RPD Pemerintah Kota Tanjungpinang 2024-2026 sebagai dasar implementasi kebijakan dan program selama periode 3 Tahun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunannya, untuk itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di tahun – tahun mendatang. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TANJUNGPINANG



**BOBY WIRA Satria, SSTP, M.Si**  
Pembina Tk.I / (IV b)  
NIP. 19830224 200112 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Landasan Hukum	3
1.3    Maksud dan Tujuan	5
1.4    Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II     HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>7</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD.	7
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3    Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	30
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>31</b>
3.1    Telaahan terhadap kebijakan nasional	31
3.2    Tujuan dan sasaran Renja SKPD	32
3.3    Program dan Kegiatan	35
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>40</b>
<b>BAB V     PENUTUP</b>	<b>52</b>
5.1    Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	52
5.2    Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2022 .....	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang .....	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	33
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
- b. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- c. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perhubungan menterjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang. Di samping itu dalam penyusunan Renja OPD juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan sasaran serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun ke 1 dari RPD 2024 - 2026 maupun Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2017 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
20. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 189);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Dishub Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari 4 sub bab, yaitu (1) latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian, maksud dan fungsi Renja, (2) Landasan hukum berisi peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renja, (3) Maksud dan tujuan disusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah, (4) Sistematika penulisan Renja yang menjabarkan secara ringkas masing-masing Bab.

- 2) Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang terdiri dari 4 sub bab yakni (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra, (2) Analisis Kinerja Pelayanan OPD, (3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
- 3) Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- 4) Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah menjelaskan tentang rencana kerja, program kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 5) Bab V Penutup.



## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya sehingga target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu dengan adanya evaluasi ini akan diketahui permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu sehingga akan dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang juga harus dilakukan evaluasi. Karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada bulan Januari 2023, oleh karena itu yang disajikan merupakan hasil pencapaian tahun 2022.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2022 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 13.251.767.651,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 12.701.958.772,- atau (95,85%) dengan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 99,30%. Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

#### **2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :**

##### **1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

- a. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota.
  - Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 290.954.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 268.180.032,- atau terserap sebesar 92,17%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah Trayek yang terintegrasi moda transportasi dengan target kinerja 3 trayek. Hasilnya 2 trayek. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek, Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum masih minim dan Terbatasnya penyediaan anggaran operasional BRT.

### **2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.930.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.967.000,- atau terserap sebesar 83,54%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah dokumen yang dihasilkan dengan target kinerja 6 dokumen terealisasi 6 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah tersusunnya Dokumen Renja Murni/Perubahan, Dokumen RKA Murni/Perubahan, Dokumen Sirup, Dokumen Perjanjian Kinerja.
  - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.566.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.433.377,- atau terserap sebesar 97,97%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah dokumen yang dihasilkan dengan target kinerja 4 dokumen terealisasi 4 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah tersusunnya Dokumen LAKIP, Dokumen LKPj, Laporan Monev/Evaluasi Renja dan LPPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.445.859.457,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.365.998.840,- atau terserap sebesar 98,93%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja

tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 196.168.929,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.287.850,- atau terserap sebesar 99,55%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 125 stel. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terealisasinya pakaian dinas baik untuk PNS maupun PTT sebanyak 125 stel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.264.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.232.445,- atau terserap sebesar 99,72%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya komponen listrik/penerangan kantor selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.991.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.903.328,- atau terserap sebesar 99,80%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.597.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.622.510,- atau terserap sebesar 89,84%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya peralatan dan rumah tangga selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 269.618.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 269.618.342,- atau terserap sebesar 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan logistik kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.623.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.860.295,- atau terserap sebesar 82,69%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.780.000,- atau terserap sebesar 97,25%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan/ bahan material dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.832.600,- atau terserap sebesar 98,61%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Tersedianya bahan/material sebanyak 1 paket. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
  - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 144.789.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.032.220,- atau terserap sebesar 90,50%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.761.000,- atau terserap sebesar 99,18%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya barang mebeler kantor sebanyak 1 paket. Hasilnya 1 paket. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan pengadaan mebel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
  - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 89.298.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.260.950,- atau terserap sebesar 99,96%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya sebanyak 8

paket. Hasilnya 8 paket. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 417.195.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 386.770.645,- atau terserap sebesar 92,71%.

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 Tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan pembayaran tagihan listrik, internet dan air dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.029.719.880,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.002.489.840,- atau terserap sebesar 98,66%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pembayaran jasa pelayanan umum kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.261.150,- atau terserap sebesar 89,05%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpeliharanya kendaraan dinas jabatan selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan,

koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pembayaran jasa dan biaya pemeliharaan kendaraan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 84.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.332.120,- atau terserap sebesar 90,39%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpeliharanya kendaraan dinas lapangan selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pembayaran jasa dan biaya pemeliharaan kendaraan, pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.003.390,- atau terserap sebesar 91,53%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.380.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.193.321,- atau terserap sebesar 99,62%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah terpeliharanya gedung kantor dan bangunan Lainnya selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan

lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

## **2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
  - Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 288.564.005,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 286.467.268,- atau terserap sebesar 99,27%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sebanyak 4 fasilitas. Hasilnya adalah 4 fasilitas. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan terhadap keselamatan pengguna jalan raya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
  - Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.680.997,- atau terserap sebesar 99,56%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara sebanyak 4 fasilitas. Hasilnya adalah 4 fasilitas. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan terhadap keselamatan pengguna jalan raya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.103.891.066,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 775.291.842,- atau terserap sebesar 70,23%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya operasional UPTD Peraprkiran selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pembayaran honorarium petugas parkir serta pemenuhan kebutuhan operasional

UPTD Peraprkiran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

c. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 185.675.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.508.750,- atau terserap sebesar 99,91%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah alat uji yang dipelihara sebanyak 4 unit selama 1 tahun. Hasilnya adalah 4 unit selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.832.000,- atau terserap sebesar 99,13%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah razia terpadu sebanyak 10 kali razia. Hasilnya adalah 10 kali razia. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terlaksananya razia terpadu bersama Polantas dan POM TNI terhadap pemeriksaan berkala angkutan umum, baik angkutan orang maupun barang guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

## **2. Program Pengelolaan Pelayaran**

- a. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- Sub kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 86.791.364,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.356.660,- atau terserap sebesar 83,37%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah sarana dan prasarana perhubungan laut yang dipelihara dengan target kinerja 3 sarpras. Hasilnya 3 sarpras. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan laut yaitu 2 unit fender dermaga di dermaga tanjung unggat dan 1 unit kapal dishub 02 guna mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Perhubungan.

**2.1.3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :**

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 tidak ada Program/kegiatan/sub kegiatan yang dalam pelaksanaannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.



Secara keseluruhan urusan Perhubungan didukung oleh sejumlah 3 program, 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, Adapun realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta target dan realisasi indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kinerja				Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Status	Target	Realisasi	%
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>							<b>13.251.767.651</b>	<b>12.701.958.772</b>	<b>95,85</b>
Peningkatan pembangunan pelabuhan (roro, barang dan bongkar muat) dan gudang logistik, penyediaan transportasi antar pulau dan antar kabupaten	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							<b>13.251.767.651</b>	<b>12.701.958.772</b>	<b>95,85</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							<b>10.971.852.216</b>	<b>10.791.641.223</b>	<b>98,36</b>
		Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	%	100	95,85	95,85	ST			
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	%	85	93	109,41	ST			
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100,00	ST			

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kinerja				Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Status	Target	Realisasi	%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>18.497.100</b>	<b>16.400.377</b>	<b>88,66</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	6	6	100,00	ST	11.930.600	9.967.000	83,54
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	4	4	100,00	ST	6.566.500	6.433.377	97,97
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>7.445.859.457</b>	<b>7.365.998.840</b>	<b>98,93</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	100,00	ST	7.445.859.457	7.365.998.840	98,93
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>196.168.929</b>	<b>195.287.850</b>	<b>99,55</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	125	125	100,00	ST	196.168.929	195.287.850	99,55
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>549.883.050</b>	<b>525.881.740</b>	<b>95,64</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	Tahun	1	1,00	100,00	ST	11.264.500	11.232.445	99,72
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Tahun	1	1,00	100,00	ST	43.991.000	43.903.328	99,80
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	1	1,00	100,00	ST	9.597.150	8.622.510	89,84
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Tahun	1	1,00	100,00	ST	269.618.400	269.618.342	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	1,00	100,00	ST	50.623.000	41.860.295	82,69
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun	1	1,00	100,00	ST	8.000.000	7.780.000	97,25
	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan / Material	Tahun	1	1,00	100,00	ST	12.000.000	11.832.600	98,61

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kinerja				Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Status	Target	Realisasi	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	1	1,00	100,00	ST	144.789.000	131.032.220	90,50
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>106.198.800</b>	<b>106.021.950</b>	<b>99,83</b>
	Pengadaan Mebel	tersedianya barang mebeler kantor	Paket	1	1,00	100,00	ST	16.900.000	16.761.000	99,18
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	8	8,00	100,00	ST	89.298.800	89.260.950	99,96
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2.446.914.880</b>	<b>2.389.260.485</b>	<b>97,64</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1	1,00	100,00	ST	417.195.000	386.770.645	92,71
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	1,00	100,00	ST	2.029.719.880	2.002.489.840	98,66
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>208.330.000</b>	<b>192.789.981</b>	<b>92,54</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Tahun	1	1,00	100,00	ST	37.350.000	33.261.150	89,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas lapangan	Tahun	1	1,00	100,00	ST	84.450.000	76.332.120	90,39
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	1,00	100,00	ST	37.150.000	34.003.390	91,53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1	1,00	100,00	ST	49.380.000	49.193.321	99,62

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kinerja				Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Status	Target	Realisasi	%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>							<b>2.193.124.071</b>	<b>1.837.960.889</b>	<b>83,81</b>
		Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas dalam Kondisi baik	%	95	95	100,00	ST			
		Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang thd kebutuhan	%	50	50,99	101,98	ST			
		Persentase kawasan tertib lalulintas	%	100	100	100,00	ST			
		Persentase kawasan tertib perparkiran	%	89,28	75	84,00	T			
		Persentase sarpras angkutan kondisi baik	%	84,21	76	90,25	T			
		Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan	%	100	50	50,00	SR			
		Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	%	65	17,38	26,74	SR			

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kinerja				Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Status	Target	Realisasi	%
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>							<b>588.564.005</b>	<b>585.148.265</b>	<b>99,42</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	fasilitas	4	4	100,00	ST	288.564.005	286.467.268	99,27
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara	fasilitas	4	4	100,00	ST	300.000.000	298.680.997	99,56
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>							<b>1.103.891.066</b>	<b>775.291.842</b>	<b>70,23</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional UPTD Perparkiran	Tahun	1	1,00	100,00	ST	1.103.891.066	775.291.842	70,23
		Jumlah petugas parkir yang terlatih	jujur parkir	180						
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>							<b>209.715.000</b>	<b>209.340.750</b>	<b>99,82</b>
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang dipelihara	Tahun	1	1,00	100,00	ST	185.675.000	185.508.750	99,91
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah razia terpadu	Razia	10	10	100,00	ST	24.040.000	23.832.000	99,13
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>290.954.000</b>	<b>268.180.032</b>	<b>92,17</b>
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Yang Terintegrasi Moda Transportasi	trayek	2	2	100,00	ST	290.954.000	268.180.032	92,17

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Kinerja				Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Status	Target	Realisasi	%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>							<b>86.791.364</b>	<b>72.356.660</b>	<b>83,37</b>
		Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	46,15	38,46	83,33	T			
		Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik	%	64,28	53,57	83,33	T			
	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah trayek angkutan laut dalam kota yang terlayani	trayek	4	0	0,00	SR	0	-	0
	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>							<b>86.791.364</b>	<b>72.356.660</b>	<b>83,37</b>
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	jumlah sarana dan prasarana perhubungan laut yang dipelihara	Sarpras	3	3	100,00	ST	86.791.364	72.356.660	83,37



215012,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.735.000.000	465.376.570		465.376.570	549.883.050	3.482.570	94.223.345	135.767.386	292.408.439	525.881.740								
215012,0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	Tahun	1	30.000.000	9.964.500	Tahun	1	9.964.500	11.264.500	0,25	-	0,25	3.854.800	0,25	3.806.500	0,25	3.571.145	1	11.232.445	100	99,72
215012,0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Tahun	1	85.000.000	43.991.000	Tahun	1	43.991.000	43.991.000	0,25	-	0,25	12.669.460	0,25	18.196.920	0,25	13.036.948	1	43.903.328	100	99,80
215012,0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	1	20.000.000	9.597.150	Tahun	1	9.597.150	9.597.150	0,25	1.227.570	0,25	1.694.880	0,25	4.367.430	0,25	1.332.630	1	8.622.510	100	89,84
215012,0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Tahun	1	375.000.000	249.955.920	Tahun	1	249.955.920	269.618.400	0,25	-	0,25	53.791.600	0,25	67.137.400	0,25	148.689.342	1	269.618.342	100	99,98
215012,0605	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Tahun	1	290.000.000	41.850.000	Tahun	1	41.850.000	50.623.000	0,25	-	0,25	7.950.105	0,25	13.562.740	0,25	20.347.450	1	41.860.295	100	82,69
215012,0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun	1	15.000.000	6.000.000	Tahun	1	6.000.000	8.000.000	0,25	-	0,25	1.410.000	0,25	4.450.000	0,25	1.920.000	1	7.780.000	100	97,25
215012,0607	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan / Material	Tahun	1	20.000.000		Tahun	1	0	12.000.000		-	-	-	-	-	1	11.832.600	1	11.832.600	100	98,61
215012,0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	1	900.000.000	104.018.000	Tahun	1	104.018.000	144.789.000	0,25	2.255.000	0,25	12.852.500	0,25	24.246.396	0,25	91.678.324	1	131.032.220	100	90,50
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,00	95,64	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST	
215012,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000	286.800.000			106.198.800									106.021.950		106.021.950		
215012,0705	Pengadaan Mebel	tersedianya barang mebeler kantor	Paket	1	400.000.000	32.800.000			1	16.900.000						1	16.761.000	1	16.761.000	100	99,18	
215012,0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	8		8	254.000.000			8	89.298.800					8	89.260.950	8	89.260.950	100	99,96	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100,0	99,83	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST	
215012,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.356.979.320	2.408.505.880		2.408.505.880	2.446.914.880	365.365.551	668.797.288	417.499.486	937.598.160	2.389.260.485								
215012,0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1	350.000.000	379.995.000	Tahun	1	379.995.000	417.195.000	0,25	43.785.695	0,25	116.786.504	0,25	95.919.630	0,25	130.278.816	1	386.770.645	100	92,71
215012,0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	2.006.979.320	2.028.510.880	Tahun	1	2.028.510.880	2.029.719.880	0,25	321.579.856	0,25	552.010.784	0,25	321.579.856	0,25	807.319.344	1	2.002.489.840	100	98,66
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				100	97,64	
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST	

215012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah				549.000.000		171.390.000		171.390.000		208.330.000		2.710.000		29.811.630		68.448.023		91.820.328		192.789.981			
215012,0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Tahun	1	55.000.000	1	37.350.000	Tahun	1	37.350.000	1	37.350.000	0,25	-	0,25	8.003.100	0,25	11.083.350	0,25	14.174.700	1	33.261.150	100	89,05
215012,0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas lapangan	Tahun	1	104.000.000	1	84.450.000	Tahun	1	84.450.000	1	84.450.000	0,25	-	0,25	16.442.430	0,25	24.880.650	0,25	35.009.040	1	76.332.120	100	90,39
215012,0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	160.000.000	1	19.730.000	Tahun	1	19.730.000	1	37.150.000	0,25	2.710.000	0,25	5.366.100	0,25	8.235.000	0,25	17.692.290	1	34.003.390	100	91,53
215012,0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1	230.000.000	1	29.860.000	Tahun	1	29.860.000	1	49.380.000	0,25	-	0,25	-	0,25	24.249.023	0,25	24.944.298	1	49.193.321	100	99,62
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100	92,54		
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST	ST		
215 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)				5.235.044.275		1.500.242.371		1.500.242.371		2.193.124.071		-		90.997.289		711.455.626		1.035.507.974		1.837.960.889	100	83,81	
215022,01	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.367.500.575		489.994.105		489.994.105		588.564.005		-		90.997.289		195.666.860		298.484.116		585.148.265			
215022,0102	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	fasilitas	7	1.387.500.575	4	189.994.105	fasilitas	7	189.994.105	4	288.564.005	0	-	2	90.997.289	2	97.265.360		98.204.619	4	286.467.268	100	99,27
215022,0104	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara	fasilitas	8	980.000.000	4	300.000.000	fasilitas	8	300.000.000	4	300.000.000	1	-	1	-	2	98.401.500		200.279.497	4	298.680.997	100	99,56
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100	99,42		
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST	ST		
215022,04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1.617.543.700		648.458.666		648.458.666		1.103.891.066		-		-		355.231.865		420.059.977		775.291.842			
215022,0402	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Kewenangan Kabupaten/Kota)	Tersedianya Operasional UPTD Perparkiran	Tahun	1	1.617.543.700	1	648.458.666	Tahun	1	648.458.666	1	1.103.891.066	0,25	-	0,25	-	0,25	355.231.865	0,25	420.059.977	1	775.291.842	100	70,23
		Jumlah petugas parkir yang terlatih	jurur parkir	180		180			180		180													
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100			
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST			

215022,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				420.000.000		80.840.000		80.840.000		209.715.000		-	-	8.000.000	201.340.750	209.340.750							
215022,0507	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang dipelihara	Tahun	1	250.000.000	1	60.800.000	Tahun	1	60.800.000	1	185.675.000	0,25	-	0,25	-	0,25	185.508.750	1	185.508.750	100	99,91		
215022,0510	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah razia terpadu	Razia	12	170.000.000	10	20.040.000	Razia	12	20.040.000	10	24.040.000	0	-	0	-	5	8.000.000	5	15.832.000	100	99,13		
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100	99,82		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	ST		
215022,09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				830.000.000		280.949.600		280.949.600		290.954.000		-	-	152.556.901	115.623.131	268.180.032							
215022,0901	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Trayek Yang Terintegrasi Moda Transportasi	trayek	4	830.000.000	3	280.949.600	trayek	4	280.949.600	2	290.954.000	0	0	0	0	2	152.556.901	0	115.623.131	2	268.180.032	100	92,17
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100	92,17		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	ST		
215 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				10.943.654.000		70.000.000		70.000.000		86.791.364		-	1.000.000	44.983.899	26.372.761	72.356.660	100	83,37					
215032,07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				-		-		-		-		-	-	-	-	-	-						
215032,0701	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah trayek angkutan laut dalam kota yang terlayani	trayek	-	-	-	-	trayek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		0	0		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR		
215032,12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				10.943.654.000		70.000.000		70.000.000		86.791.364		-	1.000.000	44.983.899	26.372.761	72.356.660							
215032,1203	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan laut yang dipelihara	Sarpras	10	10.943.654.000	3	70.000.000	Sarpras	10	70.000.000	3	86.791.364	0	0	2	1.000.000	1	44.983.899	3	26.372.761	3	72.356.660	100	83,37
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100	83,37		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											13.251.767.651	JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											12.701.958.772	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			100	95,85				
PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			ST	ST				

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dilihat dari Kinerja Indikator urusan Perhubungan di Kota Tanjungpinang ditunjukkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 (tiga) indikator dengan status capaian kategori sangat tinggi (ST), sebanyak 4 (empat) indikator dengan status capaian kategori tinggi (T), dan sebanyak 2 (dua) indikator dengan status capaian kategori sangat rendah (SR).

Indikator yang status capaiannya sangat rendah yaitu :

(1). Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan.

Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan sangat rendah yaitu :

❖ Baru 2 trayek yang terealisasi dari 4 trayek yang menjadi target. Adapun 2 trayek yang sudah terealisasi, yaitu Terminal Sei Carang - Senggarang dan Terminal Sei Carang - Dompok, sedangkan untuk penambahan 2 trayek belum dapat terpenuhi dikarenakan :

- a. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek;
- b. Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum massal masih minim;
- c. Terbatasnya penyediaan anggaran operasional BRT.,

(2). Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sangat rendah yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk menguji kendaraan bermotor wajib uji / KIR.
2. Perlu adanya pengawasan secara berkala 3 bulan sekali dalam 1 Tahun.
3. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk merawat dan memelihara kendaraannya untuk dilakukan perbaikan dibengkel apabila terjadi kerusakan yang bersifat ringan setelah diperiksa memakai alat uji yang sudah menggunakan system computer.

Kedepannya untuk capaian kinerja akan dilakukan evaluasi kembali, agar target dan capaian kinerja dapat terpenuhi.

Dibandingkan Tahun 2021, terlihat beberapa indikator mengalami peningkatan capaian kinerja, seperti :

(1) Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas dalam Kondisi baik;

(2) Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang terhadap kebutuhan;

Secara rinci perkembangan kinerja urusan Perhubungan terlihat pada tabel berikut ini.

### Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022		% Capaian Target RKPD 2022	Status *)
				Realisasi	Target	Realisasi		
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	38,46	46,15	38,46	83,34	T
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik	%	50,00	64,29	53,57	83,33	T
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas dalam Kondisi baik	%	90,20	95,00	95,00	100	ST
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang thd kebutuhan	%	44,60	50,00	50,99	101,98	ST
		Persentase kawasan tertib lalulintas	%	100	100,00	100	100	ST
		Persentase kawasan tertib perparkiran	%	70,71	89,29	75,00	84,00	T
5	Program peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase sarpras angkutan kondisi baik	%	75,00	84,21	76,00	90,25	T
		Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan	%	50,00	100,00	50,00	50,00	SR
6	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	%	9,60	65,00	17,38	26,74	SR

#### Keterangan Status Capaian:

- Sangat Tinggi (ST) Persentase capaian target lebih dari 91%
- Tinggi (T) Persentase capaian target antara 76% - 90%
- Sedang (S) Persentase capaian target antara 66% - 75%
- Rendah (R) Persentase capaian target antara 51% - 65%
- Sangat Rendah (SR) Persentase capaian target kurang dari/atau sama dengan 50%

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Beberapa yang menjadi isu penting / permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

#### 1. Bidang Lalu Lintas Jalan

- a. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana pengamanan lalu lintas.
- b. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.
- c. Belum optimalnya data dan informasi tentang kondisi existing fasilitas keselamatan yang ada sehingga dalam melakukan perencanaan masih perlu mengumpulkan data-data penunjang.

#### 2. Bidang Angkutan Jalan

- a. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi masih belum dapat terpenuhi, sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.
- b. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk menguji kendaraan bermotor wajib uji / KIR.
- c. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek.
- d. Belum adanya Kajian (jenis angkutan massal yang sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan.
- e. Masih kurangnya tenaga teknis terutama teknis pengujian kendaraan bermotor.

#### 3. Bidang Pelayaran dan Udara

- a. Belum optimalnya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan didermaga/pelabuhan pengumpan lokal.

#### 4. Bidang Sekretariat

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

#### 5. UPTD Perpajakan

- a. Masih terbatasnya fasilitas perpajakan seperti marka, rambu parkir maupun sistem pengaturan manajemen pengelolaan dan pengaturan perpajakan.

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mengarah pada pencapaian unsur visi Kota yang maju. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam menunjang misi dibidang Perhubungan harus mampu menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang selamat, lancar, aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi serta berkesinambungan dan ramah lingkungan di wilayah Kota Tanjungpinang dengan konsep dapat mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun tingkat provinsi seperti RPJP Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan tingkat kota seperti RPJPD Kota Tanjungpinang 2018-2023, RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

Adapun sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektifitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi
4. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang kompeten
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
6. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
8. Meningkatnya Kualitas Transportasi Berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 yaitu Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai didalam Rencana Strategis, yaitu :

1. Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi
2. Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :



**TABEL 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.		(Indeks Sarpras Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat/Laut)	Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi darat sesuai kebutuhan dalam kondisi baik ditambah Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi laut sesuai kebutuhan dalam kondisi baik dibagi dua	Indeks	52,23	54,13	54,28	63,44	68,21	75,64
			Rasio konektivitas Kota	Rasio konektivitas Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ . • IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd Kota} \times \text{bobot trayek}) \text{ dibagi } (\text{jumlah kebutuhan trayek pada Kota})$ • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = $(\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota} \times \text{bobot lintas}) \text{ dibagi } (\text{jumlah kebutuhan lintas})$	Rasio	0,2900	0,2900	0,4300	0,6450	0,7850	1,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				penyeberangan pada kota )							
		Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	Persentase titik kemacetan yang tertangani	Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani dibagi jumlah titik kemacetan dikali 100	Persentase	17,65	23,53	29,41	35,29	41,18	47,06
			Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	Jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat yang diberikan pengamanan dibagi jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat dikali 100	Persentase	42,86	64,29	78,57	85,71	92,86	100
		Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	jumlah daerah yang dilayani moda transportasi umum darat/laut dibagi kebutuhan dikali 100	Persentase	33,33	33,33	44,44	66,67	77,78	100,00
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	CC	CC	B

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan **Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889** yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

##### 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan aset tak berwujud
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tak berwujud
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraann Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

### **2.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

### **2.2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

### **2.3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

### **2.4. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

### **2.5. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **2.6. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **2.7. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

- Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

### **2.8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

## **3. Program Pengelolaan Pelayaran**

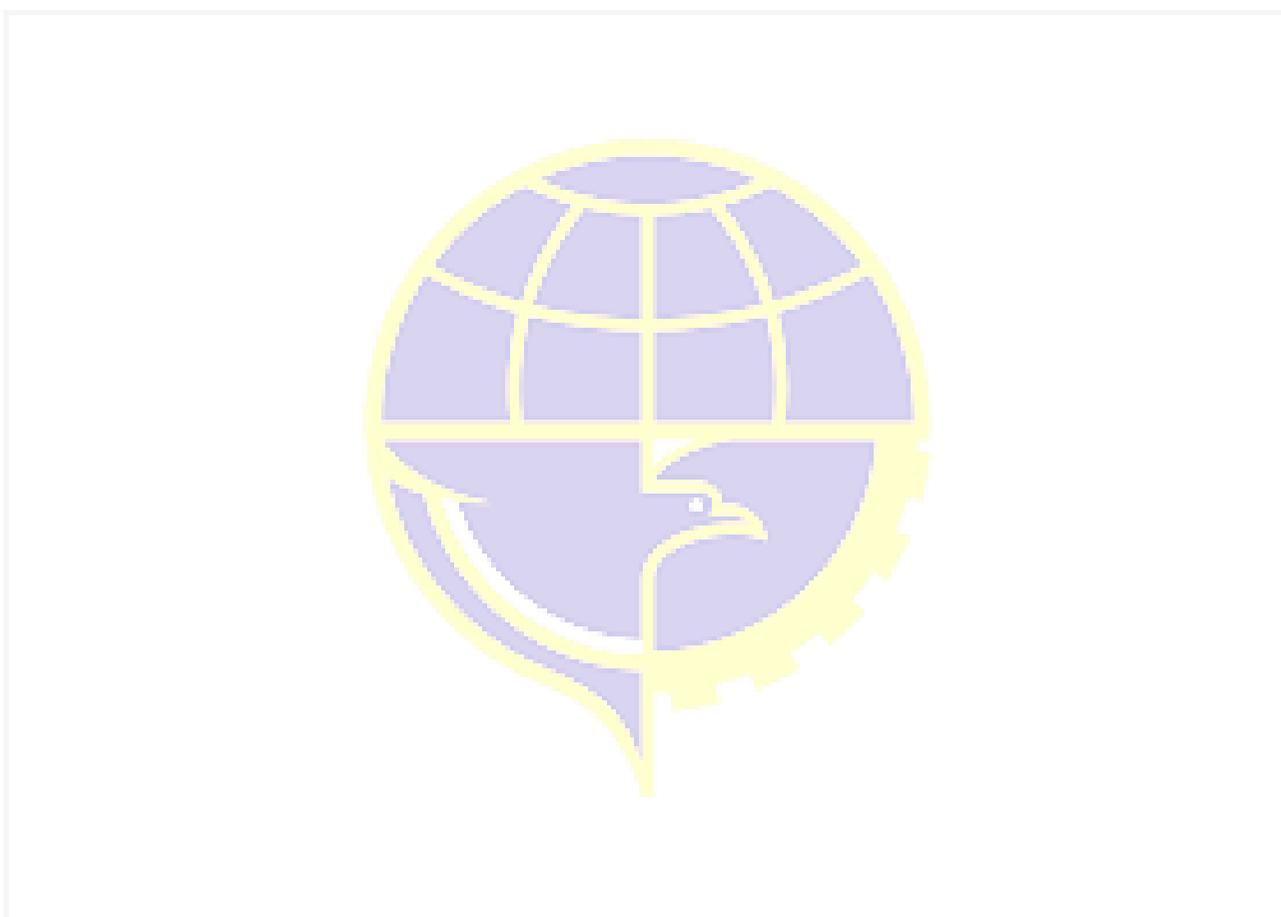
### **a. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**

- Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan
- Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

### **b. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota



## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan **Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889** yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan, sedangkan rumusan program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025  
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	BB		BB	BB	14.726.912.267		APBD				BB	15.104.227.394	Dinas Perhubungan
1	2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	35.000.000		APBD	Tidak	Tidak			38.500.000	
1.1	2.15.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	5	4	15.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		4	16.500.000	
1.2	2.15.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	20.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		6	22.000.000	
2	2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	7.383.811.267		APBD	Tidak	Tidak		100	8.122.192.394	
2.1	2.15.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	58	58	58	58	7.383.811.267	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		58	8.122.192.394	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	318.650.000		APBD	Tidak	Tidak		100	350.515.000	
3.1	2.15.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	4	1	5	168.650.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		5	185.515.000	
3.2	2.15.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	orang	2	0	2	4	150.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		4	165.000.000	
4	2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	1.340.000.000		APBD	Tidak	Tidak		100	1.474.000.000	
4.1	2.15.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	8	8	30.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		8	33.000.000	
4.2	2.15.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	8	0	9	200.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		9	220.000.000	
4.3	2.15.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	9	9	9	20.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		9	22.000.000	
4.4	2.15.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	4	24	24	100.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		24	110.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.5	2.15.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	5	7	7	150.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		7	165.000.000	
4.6	2.15.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	12	20.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		12	22.000.000	
4.7	2.15.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	1	1	1	20.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	22.000.000	
4.8	2.15.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	55.000.000	
4.9	2.15.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	750.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		12	825.000.000	
5	2.15.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase</b>					<b>2.134.431.000</b>		<b>APBD</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>			<b>1.380.000.000</b>	
5.1	2.15.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	0	1	350.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	300.000.000	
5.2	2.15.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	0	1	1.250.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		2	550.000.000	
5.3	2.15.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	1	0	4	99.906.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		5	100.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.4	2.15.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	19	13	0	8	97.500.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		8	100.000.000	
5.5	2.15.01.2.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit	0	0	1	0	55.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak				
5.6	2.15.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	-		APBD	Tidak	Tidak				
5.7	2.15.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	180.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	180.000.000	
5.8	2.15.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	102.025.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	150.000.000	
<b>6</b>	<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase</b>					<b>2.410.000.000</b>		<b>APBD</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak</b>			<b>2.450.000.000</b>	
6.1	2.15.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	10.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	100.000.000	
6.2	2.15.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	300.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	250.000.000	
6.3	2.15.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	2.100.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	2.100.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase					1.105.020.000		APBD	Tidak	Tidak			1.289.020.000	
7.1	2.15.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	1	2	200.560.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		2	280.560.000	
7.2	2.15.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	7	7	11	403.110.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		11	508.110.000	
7.3	2.15.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	0	0	10	50.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		10	50.000.000	
7.4	2.15.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	55	50	50	51.350.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		50	50.350.000	
7.5	2.15.01.2.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	0	0	0	0	30.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		2	30.000.000	
7.6	2.15.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	2	2	200.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		2	200.000.000	
7.7	2.15.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	1	70.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	70.000.000	
7.8	2.15.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	1	100.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	100.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	Persentase	84,99	85,58	86,18	87,22	8.164.741.100						88,49	6.291.575.520	Dinas Perhubungan
1	2.15.02.202	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	unit	214	292	408	581	1.642.523.200		APBD					1.806.775.520	
1.1	2.15.02.202.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang	unit	214	292	408	579	1.052.523.200	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya		750	1.157.775.520	
1.2	2.15.02.202.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	51	101	51	111	590.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya		111	649.000.000	
2	2.15.02.206	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan yang dihasilkan	Persentase	0,00	0,00	0,00	33,33	280.000.000						66,67	308.000.000	
2.1	2.15.02.206.03	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen				1	50.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	55.000.000	
2.2	2.15.02.206.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan				1	230.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	253.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi perparkiran yang dikelola dengan tertib	Persentase	70,31	74,22	81,64	85,16	1.981.857.900		APBD				89,06	2.000.000.000	
3,1	2.15.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1.981.857.900	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya		1	2.000.000.000	
			Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan	Persentase	50,00	50,00	50,00	75,00			APBD				75%		Dinas Perhubungan
4	2 15 02 209	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah trayek angkutan kota yang terlayani	Trayek	2	2	2	3	1.395.460.000		APBD				3	1.395.800.000	
4,1	2 15 02 209 01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	5	5	5	5	1.295.800.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya		5	1.295.800.000	
4,2	2 15 02 209 02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	2	2	99.660.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		2	100.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2 15 02 211	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kebijakan jaringan trayek yang dihasilkan	Persentase					330.000.000		APBD						-
5,1	2 15 02 211 01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				2	330.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya				
6	2 15 02 216	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perubahan tarif angkutan yang dikeluarkan	Dokumen				3	120.000.000		APBD						-
6.1	2 15 02 216 01	Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				1	20.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak				
6.2	2 15 02 216 02	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				1	50.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak				
6.3	2 15 02 216 03	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan				1	50.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak				

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Persentase sarana dan prasarana angkutan darat yang memenuhi standard keselamatan	Persentase	59,65	66,67	66,67	73,68			APBD				77,19		Dinas Perhubungan
7	2 15 02 203	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal yang memenuhi standard keselamatan angkutan	Persentase	64,44	68,89	68,89	77,78	630.000.000		APBD				82,22	251.000.000	
7.1	2 15 02 203 03	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	unit	0	0	0	2	400.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya				
7.2	2 15 02 203 04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	29	31	31	33	210.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya		35	231.000.000	
7.3	2 15 02 203 05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	0	0	0	2	20.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		2	20000000	
8	2 15 02 205	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	Persentase	9,89	17,38	20,38	23,50	1.784.900.000		APBD				26,38	530.000.000	
8.1	2 15 02 205 01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	11	11	11	12	1.300.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya				
8.2	2 15 02 205 02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	1	0	3	5	100.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		2	100.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.3	2.15.02.205.03	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	unit	4519	4707	4907	5107	50.000.000		APBD	Tidak	Tidak		5307	50.000.000	
8.4	2.15.02.205.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	447	818	1000	1200	100.000.000		APBD	Tidak	Tidak		1400	100.000.000	
8.5	2.15.02.205.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	3	5	5	11	140.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya		11	180.000.000	
8.6	2.15.02.205.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	1	1	1	94.900.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	100.000.000	
<b>III</b>	<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Indeks Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>18.282.217.516</b>		<b>APBD</b>				<b>9,00</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
1	2.15.03.212	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik	Persentase	33,33	33,33	44,44	61,11	18.132.217.516		APBD				77,78	350.000.000	
1.1	2.15.03.212.02	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	unit	0	0	2	2	17.848.217.516	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya				
1.2	2.15.03.212.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	0	1	2	3	234.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Ya		3	300.000.000	
1.3	2.15.03.212.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	50.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2.15.03.207	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek angkutan laut lokal yang representatif	Persentase	20,00	20,00	40,00	60,00	150.000.000		APBD				80	150.000.000	
2.1	2.15.03.207.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	1	50.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	50.000.000	
2.2	2.15.03.207.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	100.000.000	Tanjungpinang	APBD	Tidak	Tidak		1	100.000.000	
<b>JUMLAH TOTAL USULAN APBD KOTA TAHUN 2024</b>									<b>41.173.870.883,00</b>						<b>21.895.802.913,70</b>		

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Kota Tanjungpinang 2024-2026. Selain itu Rencana Kerja sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

### 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat, Bidang dan UPTD;
- b. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan masing-masing unit kerja memiliki rasa tanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

- c. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun yang bersumber dari APBN.
- d. Rencana Kerja di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Provinsi Kepulauan Riau, RPJP Kota Tanjungpinang, RPD Kota Tanjungpinang, RKPD Kota Tanjungpinang dan Renstra Dinas Perhubungan.
- e. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

